

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Anies Terkesan Tutup Mata

### Pendapatan PT KBN Merosot

**JAKARTA** - Sejumlah kalangan menilai Gubernur DKI Anies Baswaden tampak tutup mata atas kondisi yang terjadi di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta. Pasalnya, kawasan yang sahamnya dimiliki Pemprov DKI itu selalu merugi.

"Kok diam saja Pak Anies atas permasalahan yang dihadapi di Kawasan Berikat Nusantara itu, ini sudah tidak menguntungkan daerah," ujar Direktur Center Budget Analisis Uchok Sky Khadafi, Selasa (12/11/2019).

Uchok menilai, selama PT KBN dikendalikan tidak menguntungkan deviden baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Padahal, kepemilikan saham pemerintah pusat sebesar 73,15 persen atau Rp266,2 miliar. Sedang, saham Pemprov DKI sebesar 26,86 persen atau Rp97,5 miliar.

Saat ini, kata dia, pendapatan perusahaan PT KBN sudah terjadi penurunan. Misalnya, di 2017 pendapatan mencapai Rp555,44 miliar. Namun, di 2018 justru turun Rp82 miliar atau hanya mencapai Rp 473,41 miliar. "Terjadi penurunan pendapatan dari tahun 2017 ke 2018," ungkap Uchok ■

Bahkan, sambung Uchok, dampak dari penurunan pendapatan perusahaan PT KBN ini adalah penurunan laba perusahaan sebesar Rp87,12 miliar. Di mana pendapatan perusahaan pada 2017 bisa mencapai sebesar Rp397,86 miliar. Ternyata pada 2018, hanya sebesar Rp310,43 miliar.

Selain itu, kata Uchok, dampaknya dividen untuk provinsi DKI Jakarta dari tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar Rp870 juta. Padahal, di 2016 bisa mencapai sebesar Rp4,3 miliar, tapi pada 2017 hanya bisa sebesar Rp3,5 miliar.

Kemudian yang lebih prihatin lagi dari buruknya pengelola PT KBN, tegas Uchok, telah meningkatnya utang perusahaan dari 2017 ke 2018. Bila dilihat dari catatan keuangan tentang utang bank jangka pendek, pada 2017 hanya sebesar Rp18,5 miliar, dan pada 2018 sudah mencapai sebesar Rp70,5 miliar. Artinya utang

bank jangka pendek dari tahun 2017 ke 2018 naik sebesar Rp52 miliar.

Uchok meminta, Gubernur DKI Anies Baswaden jangan tutup mata atas perusahaan milik daerah. Seharusnya, Pemprov DKI mengambil langkah untuk mengevaluasi jajaran perusahaan tersebut. "Kalau perlu dipecat-pecat in saja karena perusahaan menuju bangkrut," kata dia.

Menanggapi masalah itu, Kepala Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta Haryadi mengatakan, sejauh ini untuk melakukan evaluasi tentu dilakukan tiap tahun. Tapi, untuk langkah teknis, dirinya harus melihat data yang akurat. "Datanya kebetulan ada di file, nanti yah," kata dia.

Bahkan, kata Haryadi, posisi Pemprov DKI di PT KBN sebagai minoritas. Sebab, kepemilikan sahamnya tergolong kecil ketimbang kepemilikan saham pemerintah pusat. "Jadi kota masih melakukan upaya-upaya untuk terus melakukan evaluasi," tukas dia. (dny)

## KONDISI KAWASAN BERIKAT NUSANTARA

Tahun 2017 Pendapatan sebesar Rp555,44 miliar

Tahun 2018 Pendapatan sebesar Rp473,41 miliar (Turun Rp82 miliar dari tahun sebelumnya)

### KEPEMILIKAN SAHAM

- Saham pemerintah pusat sebesar 73,15 persen atau Rp266,2 miliar
- Saham Pemprov DKI sebesar 26,86 persen atau Rp97,5 miliar

